

Kajian Analisis Pembiayaan Pendidikan: Sumber Dan Jenis Pembiayaan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Indonesia

Sahrul¹, Achmad², Bustan Ramli³, Mardyawati⁴

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, syahrulrxx@mail.com ²Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, achmadmagister25@gmail.com ³Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, bustan.ramli@uin.alauddin.ic.id ⁴Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, mardyawati71@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendidikan bermutu memerlukan tata kelola finansial yang efektif dan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi klasifikasi sumber-sumber pendanaan serta ragam jenis pembiayaan dalam penyelenggaraan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah mutakhir, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber keuangan sekolah di Indonesia bertumpu pada kontribusi kolektif multidimensi yang melibatkan APBN/APBD melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), anggaran komite sekolah, kontribusi yayasan, serta donatur publik. Selanjutnya, struktur pengeluaran finansial diklasifikasikan ke dalam tiga kategori fungsional utama, yaitu biaya operasional harian, biaya investasi aset jangka panjang, dan biaya personal individu siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komponen pembiayaan tersebut saling terkait secara fungsional-sistemis, sehingga pencapaian mutu pendidikan nasional sangat bergantung pada komitmen tanggung jawab sinergis yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua murid.

Kata Kunci : *Pembiayaan Pendidikan, Sumber Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan*

ABSTRACT

Quality education requires effective financial governance and adequate budget allocations. This study aims to deeply examine the educational financing system in Indonesia, focusing on identifying funding sources and the various types of expenditures in school administration. The research method employed is library research with a qualitative-descriptive approach. Data were collected through an analysis of regulatory documents, government policies, and contemporary scientific literature, followed by content analysis. The findings indicate that school financial resources in Indonesia rely on a multidimensional collective contribution. This includes the national/regional budgets (APBN/APBD) via School Operational Assistance (BOS) and Assistance for Poor Students (BSM), school committee funds, foundation contributions, and public donors. Furthermore, the financial expenditure structure is classified into three main functional categories: daily operational costs, long-term asset

investment costs, and students' personal costs. This study concludes that these financing components are functionally and systemically interrelated, meaning that the realization of national education quality depends heavily on a strong, synergistic responsibility among the government, community, and parents.

Keywords: Education Financing, Sources of Financing, Types of Financing

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen krusial dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sekaligus motor penggerak perubahan positif di masyarakat. Mutu SDM yang unggul menjadi pilar utama serta tumpuan dalam mendorong kemajuan dan peningkatan kualitas suatu bangsa (Christianingrum, 2018). Namun, untuk mewujudkan mutu pendidikan yang ideal, lembaga pendidikan memerlukan dukungan finansial yang memadai dan terkelola secara akuntabel (Anggaran & Pendidikan, 2025).

Dalam ekosistem sekolah, komponen keuangan dan pembiayaan berfungsi sebagai faktor produksi fundamental karena setiap aktivitas instruksional dan proses belajar mengajar selalu membutuhkan dukungan dana (Nurhalimah, 2019). Oleh karena itu, perencanaan biaya pendidikan melalui manajemen keuangan yang strategis menjadi langkah kunci untuk menjamin alokasi anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tanpa tata kelola anggaran yang matang, program peningkatan mutu akademik sulit untuk dieksekusi secara optimal.

Upaya menaikkan standar kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan berbagai variabel kompleks yang saling berkelit. Tantangan tersebut tidak hanya bersinggungan dengan aspek teknis di lapangan, melainkan mencakup ketepatan perencanaan, pemenuhan komitmen pendanaan, hingga efisiensi pengelolaan sistem pendidikan secara makro (Wakhid, 2020). Akselerasi kualitas ini menuntut adanya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berbasis pada manajemen modern.

Di Indonesia, implementasi pembiayaan pendidikan wajib bersandarkan pada koridor hukum yang berlaku. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan regulasi perundang-undangan harus terlaksana secara adil dan merata demi menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat (Apriyani et al., 2022). Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian analisis mendalam mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia, yang berfokus pada identifikasi klasifikasi sumber-sumber pendanaan serta jenis-jenis pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen, regulasi perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan fokus topik analisis pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sumber rujukan dalam penelitian ini terdiri dari buku teks, kebijakan pemerintah, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang diterbitkan dalam rentang waktu mutakhir.

Teknik analisis data menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, meliputi: pengumpulan literatur, reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data secara empiris, hingga penarikan kesimpulan. Fokus kajian diarahkan secara spesifik pada

pemetaan sumber-sumber pendanaan sekolah serta klasifikasi jenis-jenis pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan memegang peranan krusial dalam mengatur seluruh siklus pengelolaan keuangan sekolah, yang meliputi perencanaan, pembukuan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (Masditou, 2017). Pendanaan pendidikan di Indonesia bersifat multidimensi karena dihimpun dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kontribusi orang tua atau wali siswa, sumbangan masyarakat, serta alokasi anggaran internal lembaga itu sendiri (Sudarmono et al., 2021).

Secara yuridis, mekanisme pembiayaan pendidikan nasional diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengintegrasikan komitmen anggaran negara dengan partisipasi publik melalui beberapa saluran sumber dana berikut:

1. Dana Bantuan Operasional

Pembiayaan sekolah merupakan instrumen sensitif yang sering memicu kompleksitas tata kelola, terutama pada satuan pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran wajib dilakukan secara cermat, akurat, dan transparan (Waluyo et al., 2023). Sebagai solusi stimulatif, pemerintah mengalokasikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu sekolah negeri maupun swasta yang telah terdaftar resmi di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek.

BOS merupakan kebijakan strategis penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah guna mendukung keberhasilan program wajib belajar serta meringankan beban finansial masyarakat (Nugraha et al., 2023). Dana ini disalurkan secara langsung ke rekening sekolah dengan perhitungan berbasis jumlah siswa terdaftar. Sebagai timbal balik atas bantuan ini, sekolah berkewajiban memberikan keringanan hingga pembebasan biaya iuran operasional maupun agenda ekstrakurikuler, khususnya bagi siswa dari keluarga prasejahtera (Maharani et al., 2024).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, perhitungan alokasi dana BOS Reguler bersifat linear, yaitu mengalikan jumlah peserta didik pemilik NISN di Dapodik dengan satuan biaya spesifik per jenjang per tahun. Rincian nilai satuan biaya tersebut meliputi (Maharani et al., 2024):

- a. SD: Rp900.000,00
- b. SMP: Rp1.100.000,00
- c. SMA: Rp1.500.000,00
- d. SMK: Rp1.600.000,00
- e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB: Rp2.000.000,00

2. Dana Bantuan Siswa Miskin

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah yang dirancang secara khusus untuk mengeliminasi kendala ekonomi yang dihadapi oleh peserta didik dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin (Mangkuwi et al., 2024). Intervensi finansial ini bertujuan memastikan seluruh siswa memiliki peluang yang setara untuk melanjutkan dan menyelesaikan masa

studinya tanpa hambatan (Nengsi et al., 2024).

Tujuan utama program Bantuan Siswa Miskin (BSM) fokus pada tiga aspek krusial dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pertama, program ini berkomitmen mencegah angka putus sekolah dengan mengeliminasi kendala ekonomi yang sering kali memaksa anak berhenti belajar. Kedua, BSM berfungsi meningkatkan akses pendidikan dengan menarik kembali anak-anak yang terlanjur putus sekolah agar bisa kembali masuk ke dalam kelas. Terakhir, bantuan ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa, seperti membiayai seragam, sepatu, alat tulis, transportasi, hingga uang saku yang tidak ditanggung oleh fasilitas operasional sekolah.

3. Dana Orang Tua

Sumber dana yang dihimpun dari orang tua atau wali murid merupakan instrumen pembiayaan potensial yang memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur pendapatan sekolah di luar sektor anggaran negara (Anugraheni Puspita, 2023). Alokasi dana ini berfungsi secara spesifik sebagai penutup celah pembiayaan operasional (*funding gap*) guna mendanai program-program unggulan, peningkatan mutu akademik, serta penyediaan fasilitas belajar representatif yang belum terakomodasi sepenuhnya oleh bantuan operasional negara.

Tujuan utama dana dari orang tua peserta didik adalah untuk menutupi celah pembiayaan operasional sekolah yang belum terakomodasi oleh anggaran pemerintah. Dalam praktiknya, dana ini digunakan secara spesifik untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar melalui program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler.

Secara komprehensif, akumulasi seluruh pemasukan atau penerimaan dana dalam anggaran lembaga pendidikan dapat dipetakan ke dalam beberapa klasifikasi anggaran teknis sebagai berikut (Habibi et al., 2022):

- a. **Anggaran Pendidikan Nasional**, segala bentuk penerimaan anggaran dari kas negara yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi sekolah seperti; dana pendampingan operasional, dana hibah kompetitif, Biaya Operasional Sekolah, dan lain sebagainya
- b. **Anggaran Pendidikan Provinsi**, semua bentuk pemasukan dana yang diberikan oleh pemerintah propinsi dari kas keuangan propinsi kepada sekolah dalam bentuk buku, dana hibah pembangunan kelas baru, dana rehabilitasi sekolah dan beasiswa bagi peserta didik.
- c. **Anggaran Pendidikan Kota/Kabupaten**, semua bentuk pemasukan dana yang diberikan oleh pemerintah propinsi dari kas keuangan kota/kabupaten kepada sekolah dalam bentuk buku, bangku dan meja, pelatihan pengembangan kurikulum, dana hibah pembangunan kelas baru, dana rehabilitasi sekolah dan beasiswa bagi peserta didik.
- d. **Anggaran Komite Sekolah**, setiap bentuk dana yang disumbangkan oleh orangtua siswa dalam bentuk uang, buku, seragam, alat tulis, alat peraga belajar, uang iuran bulanan, uang biaya kegiatan ekstra-kurikuler dan lainnya.
- e. **Anggaran Yayasan**, setiap bentuk dana yang diberikan oleh pengurus yayasan penyelenggara sekolah yang diperuntukkan bagi program pendidikan sekolah dalam bentuk buku, alat tulis, meja dan kursi, tanah dan bangunan atau pembiayaan rutin beasiswa bagi guru dan peserta didik.
- f. **Anggaran Donatur**, setiap bentuk sumbangan dana, jasa, atau barang yang berasal dari kepemilikan donatur perseorangan atau lembaga tertentu guna

membantu operasionalisasi program sekolah dan program strategis sekolah. Misalnya, dana hibah dari Bank Dunia, Bank Pengembangan Islam, World Association Moslem Youth (WAMY) dan lainnya.

- g. Anggaran Mandiri/Lain-lain.** Pendapatan produktif yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi internal sekolah, seperti hasil penjualan produk karya siswa, laba operasional koperasi dan kantin, sewa fasilitas lahan, atau pelelangan aset lama sekolah.

Jenis Jenis Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Selain pemetaan berdasarkan asal muasal sumber sirkulasi dananya, tata kelola keuangan pendidikan di Indonesia secara makro diklasifikasikan ke dalam tiga kategori fungsi utama. Pembagian ini mengacu pada tujuan alokasi dan sifat kegunaan anggaran dalam mendukung keberlangsungan proses instruksional di sekolah (Rusitayanti et al., 2024):

1. Biaya Operasional (*Operational Cost*)

Biaya operasional merupakan dana yang dialokasikan secara khusus untuk mendanai seluruh aktivitas rutin harian sekolah. Komponen ini mencakup pengeluaran yang langsung berdampak pada pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, seperti pemenuhan hak upah atau gaji pendidik serta tenaga kependidikan, biaya perawatan berkala sarana dan prasarana sekolah, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler siswa, hingga urusan administrasi ketatausahaan sekolah. Karena sifatnya yang rutin dan vital, komponen operasional nonpersonalia ini menjadi fokus intervensi kebijakan afirmatif pemerintah melalui penyaluran program BOS.

2. Biaya Investasi (*Investment Cost*)

Biaya investasi merupakan alokasi anggaran jangka panjang yang ditujukan untuk memperluas kapasitas, meningkatkan kualitas, dan menjamin keberlanjutan mutu lembaga pendidikan di masa depan. Anggaran ini tidak habis dalam satu siklus tahunan, melainkan berwujud pada kepemilikan aset tetap (*fixed assets*). Implementasi biaya investasi meliputi pembangunan fisik infrastruktur (seperti gedung ruang kelas baru, laboratorium, dan perpustakaan), pengadaan peralatan penunjang praktik dan media digital, serta program investasi nonfisik berupa peningkatan kompetensi profesional guru melalui pelatihan atau studi lanjut.

3. Biaya Personal (*Personal Cost*)

Biaya personal atau biaya individu adalah seluruh pengeluaran finansial yang wajib ditanggung secara langsung oleh peserta didik atau orang tua demi kelancaran partisipasi proses belajar secara personal. Meskipun konstitusi telah mengamanatkan pembebasan biaya operasional sekolah pada level pendidikan dasar wajib belajar, pada praktiknya beberapa komponen personal di luar layanan sekolah tetap menjadi tanggung jawab privat keluarga. Pengeluaran ini mencakup pengadaan seragam sekolah, pembelian buku paket pribadi, ongkos transportasi harian dari rumah ke sekolah, pembiayaan uang kegiatan mandiri, hingga sumbangan sukarela lainnya.

Ketiga rumpun pembiayaan pendidikan tersebut biaya operasional, investasi, dan personal bukan merupakan entitas yang terpisah secara kaku, melainkan saling berkelit secara organik dalam struktur makro pendidikan (Nurhalimah, 2019). Pemenuhan seluruh komponen pembiayaan ini merupakan wujud tanggung jawab kolektif yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

masyarakat swasta, serta orang tua peserta didik demi mewujudkan ekosistem layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bersandar pada pembiayaan yang melibatkan sinergi berbagai sumber dana guna menjamin mutu dan keberlanjutan layanan Pendidikan. Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

Sumber keuangan sekolah bersumber dari kontribusi kolektif multidimensi.

Pemerintah pusat dan daerah memegang peran sentral melalui alokasi APBN dan APBD dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berbasis jumlah siswa di Dapodik, serta program jaminan sosial Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk menekan angka putus sekolah. Selain anggaran negara, otonomi sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengoptimalkan penghimpunan dana dari anggaran Komite Sekolah (orang tua), anggaran yayasan, donatur eksternal, hingga

Struktur pembiayaan pendidikan secara umum terbagi ke dalam tiga jenis utama, yakni biaya operasional untuk aktivitas rutin pembelajaran, biaya investasi untuk pengadaan sarana fisik jangka panjang, serta biaya personal yang ditanggung langsung oleh peserta didik. Ketiga komponen pembiayaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait secara fungsional. Keberhasilan pencapaian mutu pendidikan sangat bergantung pada pemenuhan seluruh jenis biaya ini melalui tanggung jawab sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

REFERENSI

- Anggaran, P., & Pendidikan, B. (2025). Perencanaan Anggaran Biaya Pendidikan. *Cakrawala Didaktis*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/https://jurnal.elakhyarpustaka.id/index.php/cakdis/index>
- Cakrawala
- Anugraheni Puspita. (2023). Macam-Macam Sumber Pembiayaan Pendidikan di SMK Wijaya Putra Surabaya. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1514>
- Apriyani, A., Safidah, N., Awilisni, S., & Murtafiah, N. H. (2022). Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Unisan Jurnal*, 01(03), 277–287. <https://doi.org/https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Christianingrum, R. (2018). Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Budget*, 3(2), 63–98.
- Habibi, A., Putera, L., & Riswanda, N. (2022). Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. *Manajemen Administrasi Sekolah*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/https://publikasipips.ulm.ac.id/index.php/tmkm/article/view/497/145>
- Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004>
- Mangkuwi, S. M. I., Yulia, V., Walidaini, & Safitria, W. W. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan*, 2(3), 25–39. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004>
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Ansiru PAI*, 1(20), 119–145.

- Nengsi, Y. S., Maulidika, D., Sabri, A., & Hidayatullah, R. (2024). Pengelolaan Keuangan Sekolah : Sumber Pembiayaan dan Pertanggungjawaban dalam Satuan Pendidikan. *Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(1), 144–162. <https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i1.1000>
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 75–80. <https://doi.org/10.56832/pema.v3i2.355>
- Nurhalimah, S. (2019). Konsep Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Concepts And Types Of Costs Education. *Jurnal Management of Education, Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–14.
- Rusitayanti, N. W. A., Anggreni, N. L. P. Y., Ratnasari, N. L. P., Panji, P. P., Wiguna, D., & Dewi, N. P. S. (2024). Analisis Sumber Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Sebuah Systematic Literature Review. *Prosiding Santimas*, 3(1), 185–197. <https://doi.org/https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/santimas/article/view/5612>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Wakhid, A. (2020). Konsep Penganggaran Biaya Pendidikan. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(6), 199–205.
- Waluyo, T., Harsono, & Suyatmini. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>